

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan sekarang tidak lagi dipahami semata-mata sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, melainkan sebagai proses untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara keseluruhan (Nastiti, 2023). Pendekatan pembangunan ini menempatkan pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak sebagai dimensi utama dalam menilai kesejahteraan suatu masyarakat. Oleh karena itu, Indeks Pembangunan Manusia digunakan sebagai indikator komprehensif untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia (Nastiti, 2023).

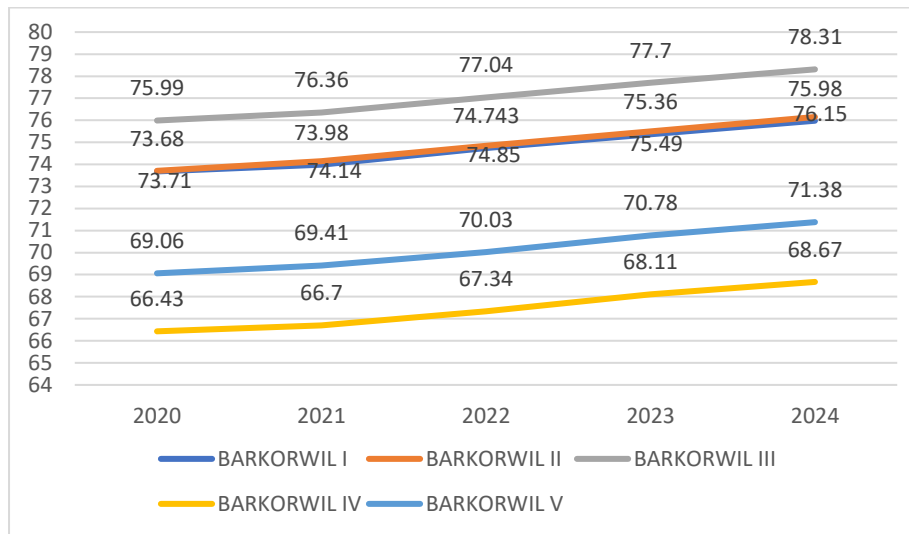
Berdasarkan *Human Development Report 2023/2024* yang diterbitkan oleh UNDP, Indonesia masih menempati peringkat ke-112 secara global dalam Indeks Pembangunan Manusia. Di tingkat Asia, Indonesia berada pada posisi ke-18, sementara di kawasan Asia Tenggara menempati peringkat ke-6, masih berada di bawah Vietnam, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Meskipun secara nasional nilai IPM Indonesia menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, pencapaian tersebut masih relatif tertinggal jika dibandingkan dengan beberapa negara lain di kawasan ASEAN (Khaerunnisa & Purnamaningrum, 2025). Posisi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia di Indonesia masih menghadapi tantangan serius.

Masih terdapat ketimpangan capaian Indeks Pembangunan Manusia antarwilayah, khususnya di tingkat regional, termasuk di Provinsi Jawa Timur. Provinsi yang ada di Pulau Jawa IPM Jawa Timur masih berada pada urutan paling rendah (Purnama & Sofro, 2024). Hal ini memperlihatkan kesenjangan pembangunan manusia antar wilayah di Jawa Timur, yang membutuhkan

perhatian dan pengelolaan yang lebih serius (Purnama & Sofro, 2024). Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendirikan Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) untuk meningkatkan efektivitas tata kelola dan pembangunan daerah.

Pembentukan ini dilandasi pada keperluan akan koordinasi yang lebih efektif di kawasan area Jawa Timur yang luas dan beraneka ragam, sesuai ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016, yang tetap berlaku sampai sekarang. Bakorwil berfungsi memperkuat koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pemerintah. Peraturan tersebut menetapkan bahwa Provinsi Jawa Timur dibagi menjadi lima wilayah koordinasi (Bakorwil), yaitu:

- Bakorwil I berkedudukan di Kota Madiun, mencakup wilayah barat daya seperti Madiun, Magetan, Ngawi, dan sekitarnya.
- Bakorwil II berkedudukan di Kabupaten Bojonegoro, meliputi daerah barat laut seperti Bojonegoro, Lamongan, Tuban, hingga Mojokerto.
- Bakorwil III berkedudukan di Kota Malang, meliputi wilayah tengah dan perkotaan besar seperti Malang, Pasuruan, Blitar, dan Surabaya.
- Bakorwil IV berkedudukan di Kabupaten Pamekasan, mencakup seluruh Pulau Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep).
- Bakorwil V berkedudukan di Kabupaten Jember, meliputi wilayah timur dan selatan seperti Jember, Bondowoso, Lumajang, Situbondo, Probolinggo, dan Banyuwangi.



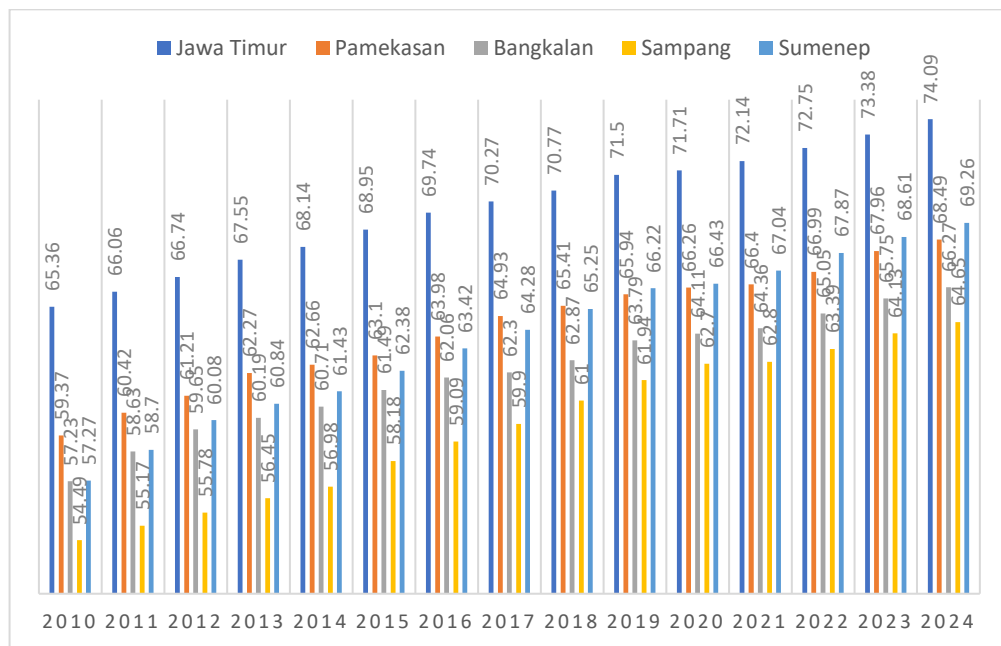
Gambar 1. 1 Indeks Pembangunan Manusia Di Bakorwil Jawa Timur 2020-2024 (Indeks)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 (data diolah)

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa pada periode 2020–2024, Bakorwil IV secara konsisten mencatat nilai IPM terendah dibandingkan wilayah Bakorwil lainnya. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan kualitas pembangunan manusia antarwilayah di Jawa Timur, di mana Bakorwil IV masih tertinggal dalam pencapaian komponen pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Peningkatan IPM yang terjadi di Bakorwil IV belum diikuti oleh laju pertumbuhan yang signifikan, sehingga wilayah ini belum mampu mengejar ketertinggalan dari wilayah Bakorwil lain di Jawa Timur.

Tabel 1. 1 Pencapaian Nilai IPM

Nilai Indeks Pembangunan	Status Pembangunan
IPM < 60	Rendah
60 < IPM < 70	Sedang
70 < IPM < 80	Tinggi
IPM > 80	Sangat tinggi



Gambar 1. 2 Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur & Bakorwil IV Tahun 2010-2024 (Indeks)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 (data diolah)

Berdasarkan gambar 1.2 dapat dijelaskan bahwa secara nasional nilai IPM Bakorwil IV dari tahun 2010 hingga 2024 terus mengalami peningkatan. Dimulai dari tahun 2010 IPM Bakorwil IV rata-rata 57.09 hingga pada tahun 2024 dengan nilai IPM rata-rata sebesar 67.16. IPM Bakorwil IV mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1-3 setiap tahunnya. Perkembangan ini menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia secara umum di Indonesia. IPM tertinggi di Bakorwil IV terjadi pada tahun 2024 dengan rata-rata sebesar 67.16. Kenaikan Bakorwil IV tersebut belum bisa mengejar ketertinggalan dengan Bakorwil lainnya maupun Provinsi Jawa Timur yang sudah sampai 74.09 .

Ketertinggalan pembangunan manusia di wilayah Bakorwil IV tercermin dari capaian IPM pada gambar 1.2 di empat kabupaten Madura yang secara konsisten di posisi tertinggal rata-rata IPM Provinsi Jawa Timur dan masih rendah. Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan menempati posisi relatif lebih

baik dibanding dua kabupaten lainnya karena nilai IPM keduanya mendekati kisaran 66, tetapi tetap tertinggal belum mampu menyamai capaian Jawa Timur.

Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang menempatkan diri sebagai wilayah dengan capaian IPM cukup rendah, nilai keduanya hanya berada pada kisaran 61 hingga 63 sehingga masih jauh tertinggal dari tingkat provinsi. Capaian terendah tersebut menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di daerah tersebut memerlukan perhatian serius. Sementara Jawa Timur yang menaungi bakorwil IV sudah melesat dengan rata-rata 71.53, dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terdapat ketimpangan dalam pembangunan manusia.

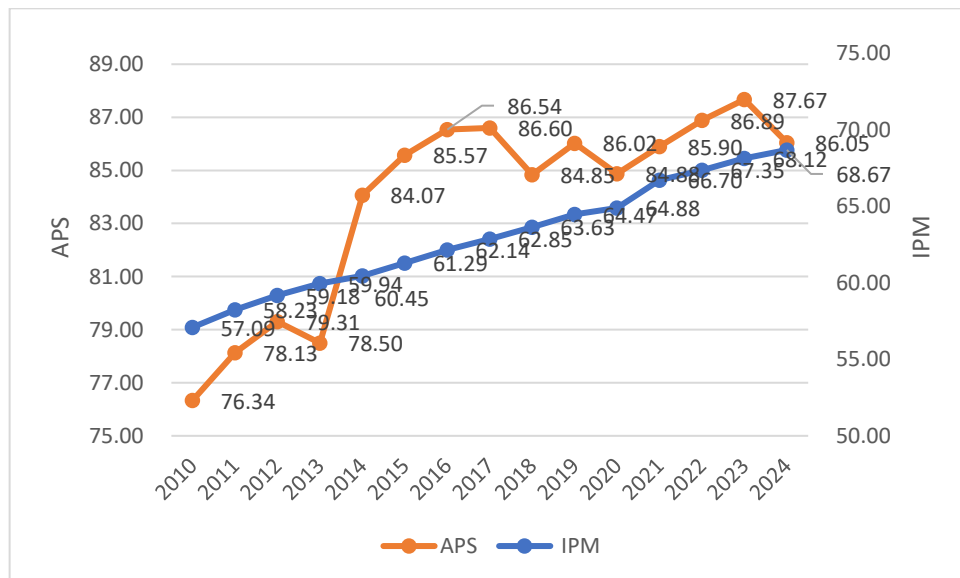
Dilihat dari sisi indikator pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sektor pendidikan merupakan salah satu aspek yang memperoleh perhatian besar dalam upaya pembangunan di Indonesia. Pendidikan berperan penting sebagai sarana pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memberikan kontribusi terhadap kemajuan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi tingkat IPM.

APS menggambarkan tingkat partisipasi penduduk usia sekolah dalam mengakses pendidikan formal sehingga dapat mencerminkan kondisi pemerataan dan aksesibilitas pendidikan di suatu wilayah. Semakin tinggi APS, semakin besar peluang masyarakat memperoleh pendidikan yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mendukung peningkatan pembangunan manusia secara keseluruhan (Nastiti & Nailufar, 2023).

Angka Partisipasi (APS) merupakan gambaran dari banyaknya jumlah siswa dalam masing-masing kelompok usia tertentu yang memperoleh pendidikan formal di sekolah (Aprilia & Cerya, 2023). Semakin tinggi angka partisipasi sekolah pada

suatu daerah maka artinya semakin banyak pula anak dengan usia sekolah yang mampu untuk bersekolah. Rendahnya APS pada mengisyaratkan kemungkinan meningkatnya angka siswa yang putus sekolah, yang dalam jangka panjang bisa menjadi hambatan bagi pengembangan sumber daya manusia dan sebaliknya.

Pendidikan sebagai komponen utama pembangunan manusia dapat dijelaskan melalui teori *human capital* yang memandang manusia sebagai modal penting dalam meningkatkan kesejahteraan. Menurut Michael P. Todaro (2020), investasi dalam pendidikan akan meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan produktivitas individu (Al Amin & Restikasari, 2024). Peningkatan tersebut akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia serta mendorong kenaikan IPM. Di Sumatera Barat penelitian Aprilia & Cerya (2023) menyatakan bahwa APS berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan IPM di Sumatera Barat, penelitian ini juga menyatakan bahwa pengaruh positif terjadi karena peran utama pendidikan dalam pembentukan masyarakat yang berdaya saing tinggi.



Gambar 1. 3 IPM dan APS di Bakorwil IV Jawa Timur Tahun 2010-2024 (dalam bentuk indeks dan persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 (data diolah)

Berdasarkan grafik Angka Partisipasi Sekolah (APS) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama periode 2010–2024, terlihat bahwa tren peningkatan IPM tidak selalu sejalan dengan pergerakan APS pada beberapa tahun. Pada periode awal 2010–2014, APS mengalami fluktuasi, di mana terjadi peningkatan dari tahun 2010 hingga 2011, kemudian mengalami penurunan pada 2012, dan kembali meningkat pada 2013 hingga 2014. Selanjutnya, pada periode 2015–2024, hubungan antara APS dan IPM terlihat lebih dinamis. Pada tahun 2017 APS mengalami penurunan dari sekitar 86,60% menjadi 86,02% pada tahun 2018, namun IPM tetap mengalami peningkatan meskipun dengan laju yang lebih lambat. Pada periode 2020–2021, APS cenderung stagnan, sementara IPM masih menunjukkan kenaikan yang tidak terlalu signifikan. Kemudian pada tahun 2023 APS mengalami peningkatan yang cukup tinggi, namun pada tahun 2024 APS kembali mengalami penurunan, sedangkan IPM tetap meningkat meskipun dengan laju yang relatif lambat dan belum mampu mencapai kesetaraan dengan Bakorwil lainnya.

Di sisi lain, IPM terus mengalami peningkatan, tetapi laju peningkatannya masih lebih lambat dibandingkan Bakorwil lainnya di Jawa Timur. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan APS tidak selalu diikuti oleh perubahan IPM secara proporsional pada setiap tahunnya. Fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut karena secara teoritis peningkatan partisipasi pendidikan diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tercermin dalam IPM. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk menguji apakah APS benar-benar berpengaruh terhadap IPM di wilayah Bakorwil IV Jawa Timur.

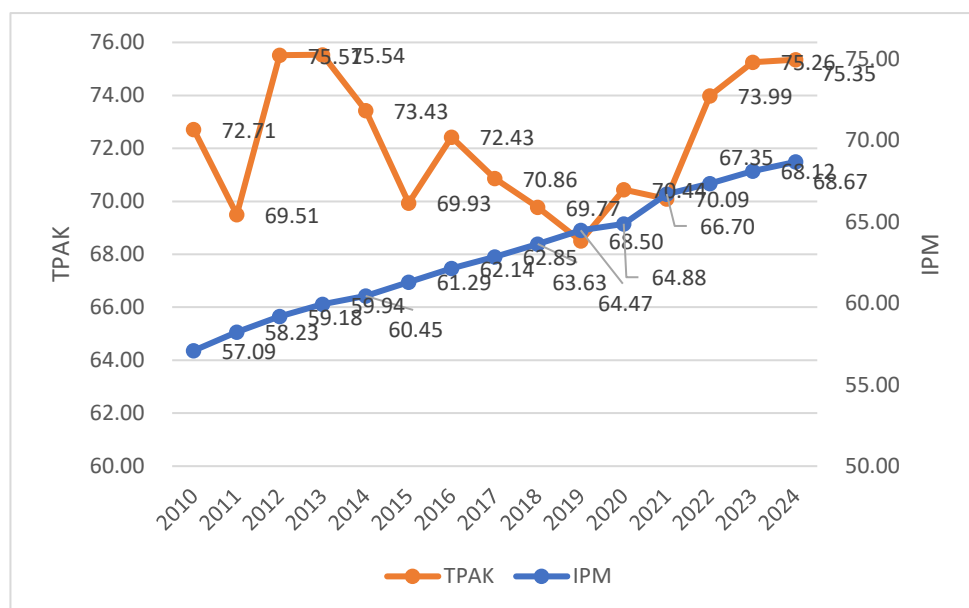
Perubahan Angka Partisipasi Sekolah (APS) tidak selalu diikuti oleh peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara proporsional pada setiap tahunnya. Kondisi ini berbeda dengan hasil penelitian Aprilia & Cerya (2023), Sari & Warsitasari, (2023) dan Hidayat, (2022) yang menyatakan bahwa APS berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sehingga peningkatan partisipasi sekolah seharusnya mampu mendorong peningkatan pembangunan manusia. Sebaliknya penelitian Linda Ayu Tivani & Kukuh Arisetyawan, (2026) menemukan hasil bahwa APS berpengaruh positif tidak signifikan terhadap IPM. Perbedaan fenomena tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara APS dan IPM di Bakorwil IV Jawa Timur masih memerlukan pengujian lebih lanjut karena karakteristik wilayah dan kondisi sosial ekonomi yang berbeda dapat memengaruhi kekuatan hubungan antarvariabel.

Variabel selanjutnya yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan salah satu variabel penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Berdasarkan Teori Modal Manusia (*Human capital*) yang dikemukakan oleh Gary S. Becker (1993), peningkatan TPAK berkaitan erat dengan investasi dalam sumber daya manusia, seperti pendidikan dan pelatihan, yang mampu meningkatkan kualitas serta daya saing tenaga kerja (Salsabila *et al.*, 2026).

Ditinjau dari dimensi standar hidup layak sebagai salah satu komponen penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang berperan penting dalam mendukung aktivitas perekonomian melalui keterlibatan tenaga kerja dalam proses produksi. TPAK menggambarkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif di pasar tenaga kerja, baik yang telah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan, sehingga

mencerminkan besarnya pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk menghasilkan barang dan jasa.

TPAK sering digunakan sebagai salah satu indikator yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam kaitannya dengan pembangunan manusia. Peningkatan TPAK menunjukkan semakin banyak penduduk usia kerja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong kenaikan pendapatan atau upah. Meningkatnya pendapatan tersebut akan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (Nastiti & Nailufar, 2023).



Gambar 1. 4 IPM dan TPAK di Bakorwil IV Jawa Timur Tahun 2010-2024
(dalam bentuk indeks dan persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 (data diolah)

Berdasarkan grafik di atas, TPAK di Bakorwil IV Jawa Timur mengalami fluktuasi yang cukup tajam selama periode 2010–2024, berbeda dengan IPM yang

menunjukkan tren peningkatan secara bertahap. TPAK meningkat dari 69,51% pada tahun 2011 menjadi 75,51% pada tahun 2012, kemudian mengalami penurunan pada periode 2013–2015 dan kembali berfluktuasi hingga tahun 2020. Meskipun setelah tahun 2021 TPAK kembali meningkat, laju peningkatan IPM masih relatif lambat dibandingkan Bakorwil lainnya di Jawa Timur. Fenomena ini menunjukkan bahwa perubahan tingkat partisipasi angkatan kerja tidak selalu diikuti oleh peningkatan IPM yang searah pada setiap periode, sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai pengaruh TPAK terhadap IPM di Bakorwil IV Jawa Timur.

Penelitian terdahulu yang membahas pengaruh TPAK terhadap IPM yaitu penelitian Rudatin & Suwito (2025) memaparkan hasil penelitian yang menunjukan TPAK secara langsung berpengaruh positif terhadap IPM yang berarti peningkatan TPAK akan meningkatkan IPM. Sejalan dengan Rudatin & Suwito (2025), menyimpulkan bahwa TPAK mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap indeks pembangunan manusia baik secara parsial maupun secara simultan. Sebaliknya, penelitian Endang & Moh. Saiful Anam (2024) menyatakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Variabel terakhir yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), pengangguran merupakan salah satu indikator penting yang mempengaruhi kualitas pembangunan manusia. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berperan penting dalam Teori Pertumbuhan Ekonomi Baru. Menurut Romer (1986), pengangguran yang tinggi dapat menghambat kemajuan kualitas tenaga kerja, yang pada gilirannya mempengaruhi perkembangan teknologi dan produksi. TPT yang tinggi berkontribusi pada rendahnya IPM, karena membatasi akses masyarakat terhadap

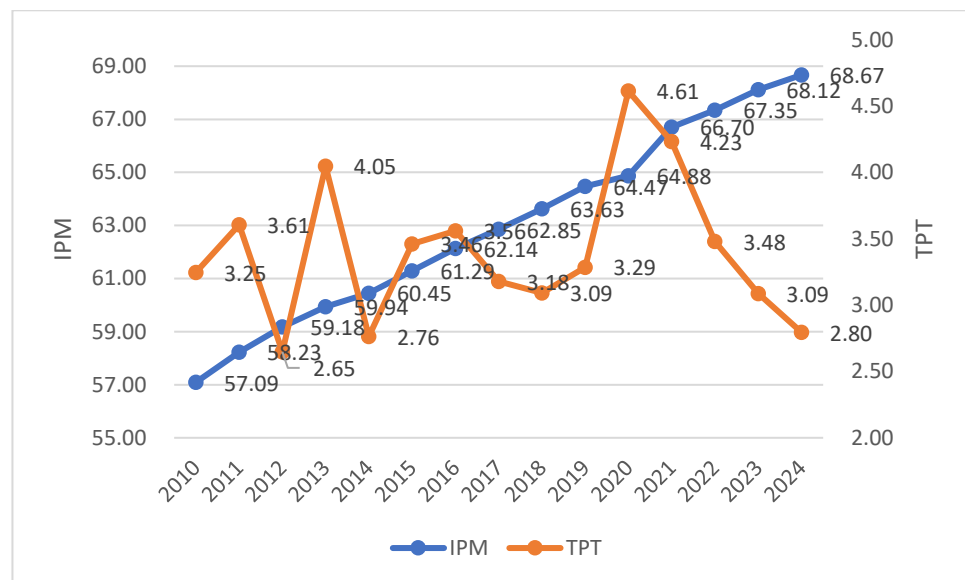
pendidikan dan kesehatan (Putri *et al.*, 2024 dalam Umamah & Syafitri, 2025). Penurunan TPT meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, yang akhirnya berkontribusi yang akhirnya berkontribusi pada peningkatan IPM (Sutardy & Mafruhah, 2022).

Hasil penelitian empiris mengenai hubungan antara Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia masih menunjukkan temuan yang beragam. Sebagian penelitian menemukan bahwa TPT berpengaruh negatif terhadap IPM, namun terdapat pula penelitian yang menunjukkan bahwa TPT memiliki pengaruh positif terhadap IPM.

Perbedaan hasil penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu dapat terjadi karena karakteristik pasar tenaga kerja dan kondisi sosial ekonomi pada setiap daerah cenderung berbeda. Secara umum, teori menyatakan bahwa peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) akan menurunkan kualitas pembangunan manusia karena berkurangnya pendapatan masyarakat sehingga akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak menjadi terbatas. Namun, pada beberapa wilayah, hubungan tersebut tidak selalu terlihat secara langsung karena kondisi ekonomi daerah memiliki struktur yang berbeda, terutama dalam kemampuan pasar kerja menyerap tenaga kerja yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh TPT terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat bersifat kontekstual sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

Wilayah dengan kualitas pendidikan yang semakin baik, peningkatan jumlah lulusan dapat menyebabkan bertambahnya jumlah pencari kerja yang belum langsung terserap oleh pasar kerja sehingga dalam jangka pendek justru meningkatkan tingkat pengangguran terbuka. Kondisi tersebut menunjukkan

bahwa peningkatan TPT tidak selalu mencerminkan penurunan kualitas pembangunan manusia, melainkan dapat menjadi konsekuensi dari meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang sedang memasuki pasar kerja.



**Gambar 1. 5 IPM dan TPT di di Bakorwil IV Jawa Timur Tahun 2010-2024
(dalam bentuk indeks dan persen)**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 (data diolah)

Berdasarkan grafik perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama periode 2010–2024, terlihat bahwa peningkatan IPM tidak selalu berjalan seiring dengan perubahan TPT pada setiap tahunnya. TPT menunjukkan pola yang berfluktuasi selama periode tersebut. Pada awal periode, TPT mengalami kenaikan dari tahun 2010 hingga mencapai puncaknya pada tahun 2012, kemudian menurun pada tahun 2013, dan kembali meningkat pada tahun 2014. Setelah itu, TPT cenderung berfluktuasi namun relatif stabil pada kisaran 3–3,5% hingga tahun 2019, sebelum mengalami lonjakan yang cukup signifikan pada tahun 2020 hingga sekitar 4,7%

akibat kondisi ekonomi yang terdampak, kemudian kembali menurun secara bertahap hingga tahun 2024.

Meskipun TPT mengalami fluktuasi yang cukup jelas selama periode 2010–2024, IPM tetap menunjukkan tren peningkatan yang stabil namun lambat. Bahkan pada saat TPT mengalami peningkatan tajam pada tahun 2020, IPM tetap mengalami kenaikan yang dapat dikategorikan lambat dari sekitar 64,6 pada tahun 2019 menjadi sekitar 64,9 pada tahun 2020. Kondisi ini juga terlihat pada tahun-tahun setelahnya, di mana penurunan TPT tidak diikuti perubahan signifikan yang drastis pada IPM, karena IPM tetap meningkat namun lambat.

Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak selalu bergerak secara berbanding terbalik sebagaimana dijelaskan dalam Teori Pertumbuhan Ekonomi Baru (*New Growth Theory*), yang menyatakan bahwa tingginya pengangguran dapat menghambat pemanfaatan sumber daya manusia dan memperlambat peningkatan kualitas pembangunan manusia. Selain itu, berdasarkan Teori Pasar Tenaga Kerja, tingkat pengangguran terjadi ketika jumlah tenaga kerja yang tersedia melebihi kesempatan kerja yang mampu diserap oleh pasar kerja. Tingginya pengangguran dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan masyarakat sehingga kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak menjadi menurun. Kondisi tersebut berpotensi menghambat peningkatan kualitas pembangunan manusia yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Fenomena tersebut juga belum sepenuhnya sejalan dengan penelitian Sutardy & Mafruhah (2022), Farrel Ferdinand & Hutabarat (2026), dan Putera (2024) yang menemukan bahwa

TPT berpengaruh signifikan negatif terhadap IPM, sehingga peningkatan TPT akan diikuti oleh penurunan IPM suatu wilayah.

Berdasarkan penelitian terdahulu, hubungan antara Angka Partisipasi Sekolah (APS), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa penelitian menemukan bahwa APS dan TPAK berpengaruh positif signifikan terhadap IPM, sedangkan penelitian lain menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan. Demikian pula, pengaruh TPT terhadap IPM masih memperlihatkan ketidakkonsistenan hasil penelitian.

Sebagian besar penelitian terdahulu dilakukan pada tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten secara umum, sementara penelitian yang secara khusus berfokus pada wilayah Bakorwil IV Jawa Timur masih relatif terbatas. Padahal, wilayah ini memiliki karakteristik sosial ekonomi yang berbeda serta secara konsisten menunjukkan capaian IPM terendah dibandingkan wilayah Bakorwil lainnya di Jawa Timur.

Di sisi lain, secara empiris APS, TPAK, dan TPT di wilayah Bakorwil IV Jawa Timur menunjukkan pola yang berfluktuasi selama periode 2010–2024. Meskipun demikian, IPM cenderung mengalami peningkatan secara bertahap, namun masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan APS, TPAK, dan TPT tidak selalu diikuti oleh perubahan IPM yang searah sebagaimana yang dijelaskan dalam teori maupun hasil beberapa penelitian terdahulu. Fenomena ini mengindikasikan adanya hubungan yang perlu dikaji lebih lanjut antara variabel pendidikan dan ketenagakerjaan dengan pembangunan manusia di wilayah Bakorwil IV Jawa Timur. Dengan demikian,

penelitian ini mengusung judul **pengaruh Angka Partisipasi Sekolah, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Wilayah Bakorwil IV Jawa Timur Tahun 2010-2024**” Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi IPM di Bakorwil IV. Berbeda dari studi sebelumnya dalam hal ruang lingkup dan periode penelitian. Penelitian ini menggunakan seluruh Kabupaten di madura dengan rentang waktu 2010–2024, sehingga memberikan gambaran empiris yang lebih komprehensif mengenai IPM di pulau madura.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang penelitian, disusun beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Angka Partisipasi Sekolah (APS) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Bakorwil IV Jawa Timur pada tahun 2010–2024?
2. Bagaimana pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Bakorwil IV Jawa Timur pada tahun 2010–2024?
3. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Bakorwil IV Jawa Timur pada tahun 2010–2024?
4. Bagaimana pengaruh Angka Partisipasi Sekolah (APS), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Bakorwil IV Jawa Timur pada tahun 2010–2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan secara empiris menguji dampak langsung dari variabel-variabel yang digunakan, yaitu:

1. Mengkaji pengaruh Angka Partisipasi Sekolah (APS) dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada wilayah Bakorwil IV Jawa Timur dalam periode 2010–2024.
2. Mengkaji pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada wilayah Bakorwil IV Jawa Timur dalam periode 2010–2024.
3. Mengkaji pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Bakorwil IV Jawa Timur dalam periode 2010–2024.
4. Mengkaji pengaruh Angka Partisipasi Sekolah (APS), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada wilayah Bakorwil IV Jawa Timur dalam periode 2010–2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dalam aspek teoritis maupun praktis, dengan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pada pengembangan ilmu ekonomi pembangunan, terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu, temuan dari penelitian ini juga diharapkan dapat mendukung bukti empiris yang telah ada sebelumnya mengenai dampak Angka Partisipasi Sekolah (APS),

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap IPM, sehingga dapat memperkaya literatur akademis dalam bidang pembangunan daerah dan peningkatan mutu sumber daya manusia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak. Bagi pemerintah daerah di wilayah Bakorwil IV Jawa Timur, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan manusia, khususnya pada bidang pendidikan, pemerataan pendapatan, dan penanggulangan pengangguran. Bagi instansi perencanaan daerah seperti Bappeda dan OPD terkait, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan program prioritas yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan IPM di masing-masing kabupaten. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan memberi gambaran mengenai pentingnya partisipasi sekolah, pemerataan kesejahteraan, dan penurunan pengangguran dalam mendorong kualitas hidup. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi empiris untuk pengembangan kajian lanjutan terkait pembangunan manusia di wilayah Madura maupun daerah lain dengan karakteristik serupa.